

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 20 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2015 -  
 2019.

I. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil Anjab dan ABK 2 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Anjab dan ABK b. Pelaksanaan Anjab dan ABK c. Penyusunan Hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	100.000.000,00
	2) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan c. Penyusunan hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	115.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3)	Penyusunan rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.	Dokumen rencana kebutuhan PNS	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan PNS													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan PNS															
			c. Penerapan hasil pada rekrutmen															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
4)	Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS	Sistem rekrutmen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan sistem rekrutmen													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 sistem	b. Kajian penyempurnaan sistem															
			c. Penyusunan sistem baru															
			d. Uji coba															
5)	Pelaksanaan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen PNS setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
6)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		70%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka															
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7)	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Penyusunan rencana evaluasi jabatan													Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	223.416.000,00	
		1 Dokumen	b. Pelaksanaan evaluasi jabatan															
			c. Penyusunan hasil evaluasi jabatan															
			d. Penerapan hasil evaluasi jabatan															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
8)	Pelaksanaan <i>assessment</i> kompetensi terhadap seluruh PNS	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		70%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
9)	Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan PNS, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis	Dokumen rencana kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai	a. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
10)	Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1,6%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	■	■	■	■	■	■								BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional						■	■	■	■	■	■	■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi						■									
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■			
12)	Pelaksanaan rencana penempatan dan pola karier PNS	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		70%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier			■	■	■	■	■	■	■	■	■				
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi						■						■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
13)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya		■	■										BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya				■	■	■									
			c. Uji coba							■	■	■						
			d. Penyempurnaan hasil uji coba										■	■	■			
			e. Tindak lanjut hasil penyempurnaan	2016														
14)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi	■												BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		2 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi		■	■												
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		■	■												
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi				■	■	■	■	■	■	■	■	■			

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (RP)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15)	Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
16)	Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i>	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Penyusunan rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i>														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat															
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
17)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM													Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
18)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM															
		80%																
19)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	20) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														SKPD terkait Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Penyusunan prioritas																
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan																
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
2.	Peningkatan disiplin aparatur																		
1)	Penyusunan dan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja di bawah standar  25%	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem penilaian kinerja PNS														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Pembangunan sistem penilaian kinerja PNS																
			c. Uji coba																
			d. Penyempurnaan hasil uji coba																
			e. Penerapan sistem penilaian kinerja PNS																
			f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			g. Evaluasi																
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi																
2)	Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti  100%	a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin PNS													BKD Inspektorat Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
			b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS																
			c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																		
	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	298.500.000,00
			b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																
		32 Ranperda	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016															
	2) <i>Workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam <i>workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i>															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	334.900.000,00
			b. Pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD																
		70%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016															
	3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	748.600.000,00
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD																
		23 Ranperda	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD	■												Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000,00	
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		60 Ranperwali 500 Rankepwali	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		e. Evaluasi						■							■			
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016															
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	■												Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	300.000.000,00	
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		■	■												
		20 Perda 20 Perwali	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		f. Evaluasi						■							■			
g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016																	
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali		■	■										Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	125.000.000,00	
		5 Dokumen	b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah				■											



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
7)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan														Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018-
			i. Tindak lanjut hasil monitoring															
8)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
9)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
			b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
10)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
			b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.	Penguatan Pengawasan																		
	1) Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	Jumlah Auditor 8 orang Jumlah P2UPD 5 orang	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi 100%		<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
	3) Penyusunan rencana peningkatan SPIP	% evaluasi SPIP SKPD 100%	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP															Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	4) Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP 100%	a. Penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi															Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
	5) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual untuk seluruh SKPD	Opini BPK WTP	Penyusunan rencana monitoring															BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
	6) Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan berbasis akrual	Jumlah Sosialisasi 4 kali	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan															BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
	7) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual di SKPD	Opini BPK WTP	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring															BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi 2 kali	Sosialisasi LHPKN														BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013- 2018
9)	Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 100%	a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN															
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
11)	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN															
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN															
13)	Penerapan <i>wistleblower</i>	% jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 100%	a. Penyusunan rencana penerapan <i>wistleblower</i> b. Penyusunan pedoman pelaksanaan <i>wistleblower</i> c. Sosialisasi d. Penerapan <i>wistleblower</i> e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi															
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70%	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>											BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018			
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik																	
	1) Penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap 5 Ranperwal	a. Identifikasi kebutuhan kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap														Bagian Organisasi Inspektorat SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	125.000.000,00
			b. Penyusunan sistem dan prosedur tetap															
			c. Pembahasan rancangan kebijakan sistem dan prosedur tetap dengan stakeholder															
			d. Penetapan sistem dan prosedur tetap															
			e. Penerapan sistem dan prosedur tetap															
			f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			g. Evaluasi															
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														

No.	Program/Kegiatan	Indikator		Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan	Standar	a. Identifikasi jenis pelayanan yang memerlukan Standar Pelayanan	■												SKPD terkait Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	250.000.000,00
				b. Penyusunan Standar Pelayanan		■	■											
		10 SP				■	■											
		c. Pembahasan Standar Pelayanan bersama seluruh stakeholder				■												
		d. Penetapan Standar Pelayanan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		e. Penerapan Standar Pelayanan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		g. Evaluasi								■					■			
h. Tindak lanjut hasil evaluasi					2016													
3)	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun	Standar	a. Identifikasi kebutuhan SOP yang akan disusun		■											SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
				b. Identifikasi berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP		■												
		100 SOP				■	■											
		c. Analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya				■	■											
		d. Penulisan SOP				■	■	■										
		e. Pengujian dan review						■										
		f. Pengesahan dokumen SOP						■										
		g. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi							■	■	■	■	■	■	■			
		h. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring								■	■	■	■	■	■			
		i. Evaluasi									■				■			
j. Tindak lanjut hasil evaluasi					2016													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	■												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	200.000.000,00	
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP		■	■	■											
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP				■	■	■									
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder				■	■	■									
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan						■	■								
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi								■							
			g. Legislasi Rancangan Perda	2016														
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	■												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	67.100.000,00	
		1 Ranperwal	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota		■	■	■											
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Walikota				■											
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>					■										
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan						■									
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin						■	■	■	■	■	■	■			■
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring						■	■	■	■	■	■	■			■
			h. Evaluasi												■			
			i. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim Teknis untuk Penerbitan Izin 11.256 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															BP2T Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	257.400.000,00
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan 11.256 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	257.400.000,00
	3) Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling 4 kali/bulan	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan c. Pelaksanaan layanan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi															BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	58.300.000,00

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4)	Pengembangan SIM Perizinan	SIM Perizinan	a. Identifikasi permasalahan operasional SIM Perizinan	■	■											BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	180.125.000,00
		1 aplikasi	b. Perancangan model pengembangan aplikasi SIM Perizinan			■	■	■	■								
			c. Uji coba SIM Perizinan						■								
			d. Penyempurnaan SIM Perizinan							■							
			e. Penerapan SIM Perizinan								■	■	■	■	■		
			f. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan									■	■	■	■		
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring										■	■	■		
			h. Evaluasi terhadap penerapan												■		
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	2016													
5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan		■										Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya		■	■											
			c. Pelaksanaan survei				■	■	■								
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survei					■	■	■							
			e. Penyusunan rekomendasi							■							
6)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan	■										BP2T Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	200.000.000,00		
		80%	b. Identifikasi <i>user requirement</i>		■	■	■										
			c. Uji coba sistem			■	■										
			d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>					■	■	■	■	■	■			■	
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan						■	■	■	■	■			■	
			f. Evaluasi													■	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016													



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7)	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik													Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik														
		60%	c. Penetapan parameter monev pelayanan publik														
		d. Pelaksanaan monev pelayanan publik															
		e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
		f. Evaluasi															
		g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2016														
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik													Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring														
9)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik														
		80%															
10)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														
		80%	b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik														
11)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi													Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Penyusunan prioritas														
		100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan														
		d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu 1) Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 30%	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaikan hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 30%	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaikan hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															
9.	Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan 80%	a. Penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	830.000.000,00
			b. Persiapan sarana, prasarana dan SDM pelaksana pelayanan															
			c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2)	Pengelolaan <i>Maintenance</i> Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	119.400.000,00		
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	b. Identifikasi <i>Trouble Shooting</i> jaringan																	
			c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan																	
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																	
			e. Evaluasi																	
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
3)	Penyusunan arsip Digital administrasi kependudukan	Dokumen arsip digital kependudukan	a. Penyusunan rencana penyusunan arsip digital administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		1 Dokumen	b. Penyusunan arsip Digital administrasi kependudukan																	
			c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																	
			d. Evaluasi																	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
4)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan																	
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan																	
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																	
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10.	<i>Quick Wins</i>																
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)		■	■	■										
		80%	b. Penyusun sistem		■	■	■										
			c. Uji coba sistem			■	■										
			d. Penyempurnaan sistem			■	■	■									
			e. Penerapan sistem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		90%	i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi						■	■	■	■	■	■	■	■	■
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya							■	■	■	■	■	■	■	■
	2) Penerapan pelayanan perizinan paralel			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>												BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	65.000.000,00
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>													
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>													
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel (menyangkut mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	d) Uji coba																	
	e) Penyempurnaan hasil uji coba																	
	f) Sosialisasi																	
	g) Pembukaan dan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel	(1) Pembukaan pelayanan perizinan paralel															
		80%	(2) Penerapan pelayanan perizinan paralel															
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	(1) Monitoring															
		90%	(2) Tindak lanjut hasil monitoring															
	i) Evaluasi																	
	j) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi			2016														
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas															
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD	Penyiapan 7 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	4) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada 7 SKPD															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12.	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Evaluasi																
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
		80%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																
	7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya																
		80%	b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																
12.	Penataan Ketatalaksanaan																		
12.	1) Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	% dari Jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>														Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Penyusunan rencana pembahasan penataan																
			c. Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>																
			d. Penetapan kebijakan																
			e. Implementasi																
	2) Penyempurnaan <i>e-procurement</i>	Tingkat kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. Penyempurnaan <i>e-procurement</i>															LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Lanjutan penerapan <i>e-procurement</i>																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																		
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>															Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan																
			c. Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>																
			d. Penetapan kebijakan																
			e. Implementasi																
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis															Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)																
			c. Penerapan hasil penataan	2016															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																